



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.70, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana
Penyesuaian Infrastruktur. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/PMK.07/2011
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENYESUAIAN
INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

Memperhatikan : Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

- (1) Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 yang dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
- (2) Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah ditetapkan sebesar Rp7.700.800.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah yang selanjutnya disingkat DPID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan infrastruktur di daerah dan ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Pasal 2

- (1) Daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang menerima DPID beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (2) Rincian daerah penerima DPID dan besaran alokasi DPID adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Besaran alokasi DPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan setiap bidang.

Pasal 3

- (1) Daerah wajib menggunakan DPID sesuai dengan bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Daerah penerima DPID tidak diperbolehkan melakukan pergeseran antar bidang.

Pasal 4

DPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 5

Alokasi DPID untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota digunakan untuk belanja modal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi dipergunakan untuk:

- a. Bidang Kesehatan;
- b. Bidang Infrastruktur Jalan;
- c. Bidang Infrastruktur Irigasi; dan
- d. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah;

Pasal 7

Alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk daerah kabupaten dan kota dipergunakan untuk:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Kesehatan;
- c. Bidang Infrastruktur Jalan;

- d. Bidang Infrastruktur Irigasi;
- e. Bidang Infrastruktur Air Minum;
- f. Bidang Infrastruktur Sanitasi;
- g. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah;
- h. Bidang Kelautan dan Perikanan;
- i. Bidang Pertanian;
- j. Bidang Lingkungan Hidup;
- k. Bidang Kehutanan;
- l. Bidang Sarana Perdagangan;
- m. Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan;
- n. Bidang Listrik Pedesaan;
- o. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- p. Bidang Keselamatan Transportasi Darat; dan
- q. Bidang Transportasi Perdesaan;

Pasal 8

- (1) Penyaluran DPID Tahun Anggaran 2011 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.
- (4) Penyaluran Tahap I dapat dilaksanakan setelah daerah penerima alokasi DPID menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan surat pernyataan kesanggupan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (5) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 September 2011.
- (7) Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporan penyerapan penggunaan DPID tahap sebelumnya diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (8) Laporan penyerapan penggunaan DPID sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

- (1) Laporan penyerapan penggunaan DPID Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diterima Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan penyerapan penggunaan DPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) disampaikan daerah penerima alokasi DPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPID harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011.
- (2) Hasil dari kegiatan yang didanai DPID sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011.

Pasal 11

- (1) Daerah penerima DPID dapat melakukan optimalisasi penggunaan DPID dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DPID dalam APBD perubahan tahun berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DPID lebih kecil dari pagu bidang DPID tersebut.
- (2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang yang sama.

Pasal 12

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPID dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

RINCIAN ALOKASI DANA PENYERAPAN DAN PENYALURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO	PROVINSI /KABUPATEN/KOTA	PENDIDIKAN	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMDA	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA PEDESAAN UNTUK DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	LISTRIK PERDESAAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	JUMLAH
1	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
2	Kab Aceh Besar	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
3	Kab Aceh Singkil	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
4	Kab Aceh Tamiang	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
5	Kab Aceh Tenggara	-	9.900.000,0	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
6	Kab Aceh Timur	-	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
7	Kab Aceh Utara	-	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
8	Kab Bireun	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
9	Kab Pidie	-	4.950.000,0	24.750.000,0	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
10	Kab Simeulue	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
11	Kota Banda Aceh	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
12	Kota Sabang	-	-	34.650.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.650.000,0
13	Kota Lingsa	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
14	Kota Lhokseumawe	-	5.000.000,0	9.900.000,0	-	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.800.000,0
15	Kab Nagan Raya	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
16	Kab Aceh Jaya	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
17	Kab Gayo Lues	-	-	39.600.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
18	Kab Aceh Tamiang	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
19	Kab Bener Meriah	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
20	Kota Subulussalam	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
21	Kab Pidie Jaya	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
22	Kab Aceh	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,0
23	Kab Labuhan Batu	-	-	39.600.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
24	Kab Nias	-	5.940.000,0	12.870.000,0	990.000,0	-	-	990.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.790.000,0
25	Kab Taparuli Selatan	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
26	Kab Taparuli Tengah	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
27	Kab Taparuli Utara	-	-	24.750.000,0	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
28	Kota Binja	-	12.672.000,0	7.425.000,0	14.850.000,0	3.465.000,0	-	1.188.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.800.000,0
29	Kota Sibolga	-	7.108.200,0	10.018.800,0	-	-	-	3.960.000,0	3.663.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
30	Kota Tebing Tinggi	-	-	3.960.000,0	13.860.000,0	-	-	1.980.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
31	Kab Pakpak Bharat	-	-	34.650.000,0	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0

(dalam ribuan rupiah)

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEURANGAN
NOMOR 25 /PMK/07/2011 TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA
PENYERAPAN INFRASTRUKTUR DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	PROVINSI / KABUPATEN/KOTA	PENDIDIKAN	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMDA	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA PEDESAAN UNTUK DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	LISTRIK PERDESAAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	JUMLAH
32	Kab. Serdang Bedagai	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
33	Kab. Sumsel	-	4.455.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.455.000,0
34	Kab. Batu Bara	-	-	-	-	-	-	10.098.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.098.000,0
35	Kab. Labuhan Batu Utara	-	9.900.000,0	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
36	Kab. Padang Lawas	-	3.292.047,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.292.047,0
37	Kab. Padang Lawas	-	-	990.000,0	-	-	-	3.960.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,0
38	Kab. Lingsuluh Kota	-	-	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,0
39	Kab. Padang Pariaman	-	-	-	-	19.800.000,0	-	18.810.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.610.000,0
40	Kab. Pasaman	-	-	-	-	-	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.850.000,0
41	Kab. Sijunjung	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
42	Kota Sawahlunto	-	7.920.000,0	31.680.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
43	Kota Pariaman	-	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
44	Kab. Dharmasraya	-	9.900.000,0	19.800.000,0	-	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.205.000,0
45	Kab. Solok Selatan	-	6.930.000,0	22.275.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
46	Kab. Meranti	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
47	Kab. Kepulauan Anambas	-	1.485.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.415.000,0	-	-	14.850.000,0
48	Kab. Kerinci	-	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.850.000,0
49	Kab. Mado Jambi	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
50	Kab. Lahat	-	-	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
51	Kab. Muar Rawas	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
52	Kab. Ogan Komering Ilir	-	4.950.000,0	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
53	Kab. Ogan Komering Ulu	-	4.950.000,0	12.770.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.720.000,0
54	Kota Lubuk Linggau	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
55	Kab. Ogan Ilir	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,0
56	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	-	-	9.900.000,0	-	-	-	9.900.000,0	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
57	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	-	-	14.850.000,0	-	-	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
58	Provinsi Bangka Belitung	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
59	Kab. Bangka Tengah	-	-	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.850.000,0
60	Kab. Bengkulu Selatan	-	7.747.245,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.747.245,0
61	Kab. Bengkulu Utara	-	8.093.819,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.093.819,3
62	Kab. Rejang Lebong	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
63	Kota Bengkulu	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
64	Kab. Seluma	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0

(dalam ribuan rupiah)

NO	PROVINSI / KABUPATEN/KOTA	PENDIDIKAN	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMDA	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA PEDESAAN UNTUK DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	LISTRIK PERDESAAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	JUMLAH
65	Kab. Mukomuko	-	-	-	-	-	-	9.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.800.000,0
66	Kab. Lebong	-	-	34.650.000,0	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
67	Kab. Kepahiang	-	-	29.700.000,0	4.950.000,0	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
68	Kab. Bengkulu Tengah	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,0
69	Provinsi Lampung	-	-	28.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.700.000,0
70	Kab. Lampung Barat	-	8.910.000,0	28.730.000,0	9.225.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.640.000,0
71	Kab. Lampung Selatan	-	-	19.350.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.975.000,0
72	Kab. Lampung Utara	-	8.910.000,0	28.730.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.640.000,0
73	Kab. Lampung Timur	-	24.453.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.453.000,0
74	Kab. Tanggamus	-	-	23.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.750.000,0
75	Kab. Tulang Bawang	-	-	9.900.000,0	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
76	Kab. Way Kanan	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
77	Kota Bandar Lampung	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
78	Kota Metro	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
79	Kab. Pesawaran	-	-	9.900.000,0	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
80	Kab. Pringsewu	-	-	-	-	-	-	9.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.800.000,0
81	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.800.000,0
82	Kab. Masiwi	-	-	4.950.000,0	34.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.650.000,0
83	Kab. Giris	-	-	14.850.000,0	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
84	Kab. Kumeng	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
85	Kab. Purnawar	-	9.900.000,0	10.692.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.592.000,0
86	Kab. Sukabumi	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
87	Kab. Samedang	9.900.000,0	-	14.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.800.000,0
88	Kota Cirebon	3.960.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.960.000,0
89	Kota Tasikmalaya	-	-	6.930.000,0	-	-	-	-	-	7.920.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	14.850.000,0
90	Kota Banjar	-	-	9.900.000,0	9.900.000,0	495.000,0	980.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
91	Kab. Latak	-	-	29.700.000,0	9.108.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.808.000,0
92	Kab. Pandeglang	-	-	14.850.000,0	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.650.000,0
93	Kota Serang	-	-	19.800.000,0	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
94	Kota Tangerang Selatan	-	-	14.850.000,0	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
95	Kab. Bira	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
96	Kab. Demak	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
97	Kab. Jepara	-	-	7.425.000,0	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.325.000,0

(dalam ribuan)

NO	PROVINSI / KABUPATEN/KOTA	PENDIDIKAN	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMDA	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA PEDESAAN UNTUK DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	LISTRIK PERDESAAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	JUMLAH
98	kab Karanganyar	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
99	kab Kebumen	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
100	kab Kendal	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
101	kab Klaten	-	-	18.315.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.315.000,0
102	kab Magelang	-	5.692.946,5	1.237.500,0	9.900.000,0	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.930.446,5
103	kab Purbalingga	-	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,0
104	kab Rembang	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
105	kab Sukoharjo	-	-	15.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,0
106	kab Tegal	-	-	22.770.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.770.000,0
107	kab Wonorejo	-	-	18.612.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.612.000,0
108	kab Wirosoedjo	-	-	9.373.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.373.500,0
109	kota Surakarta	-	-	20.790.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.790.000,0
110	kota Tegal	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,0
111	kab Banyuwangi	-	-	7.920.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.920.000,0
112	kab Gunung Kidul	-	-	39.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.800.000,0
113	kab Kulon Progo	-	-	12.870.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.870.000,0
114	kab Bangkalan	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
115	kab Blitar	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,0
116	kab Bondowoso	-	-	12.870.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.870.000,0
117	kab Lamongan	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
118	kab Magetan	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,0
119	kab Ngawi	-	-	22.770.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.770.000,0
120	kab Pacitan	-	-	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.850.000,0
121	kab Pamekasan	-	-	27.720.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.720.000,0
122	kab Probolinggo	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
123	kab Sampang	-	-	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.850.000,0
124	kab Tenggaling	-	-	13.860.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.860.000,0
125	kab Tulungagung	-	-	4.455.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.455.000,0
126	kota Blitar	-	-	17.820.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.820.000,0
127	kota Pasuruan	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
128	kota Probolinggo	-	-	7.920.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.920.000,0
129	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	59.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.800.000,0
130	kab Bengkayang	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,0

(dalam ribuan rupiah)

NO	PROVINSI / KABUPATEN/KOTA	PENDIDIKAN	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMDA	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA PEDESAAN UNTUK DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	LISTRIK PERDESAAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	JUMLAH
131	Kab. Landak	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
132	Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
133	Kab. Ketapang	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
134	Kab. Pontianak	-	-	14.850.000,0	6.930.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.780.000,0
135	Kab. Sambas	-	-	8.910.000,0	-	2.970.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.880.000,0
136	Kab. Sintang	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
137	Kab. PONTIANAK	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
138	Kota Singkawang	-	-	10.485.000,0	-	-	-	-	9.900.000,0	-	-	-	9.405.000,0	-	-	-	-	-	29.800.000,0
139	Kab. Sekadau	3.860.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,0	-	-	3.860.000,0
140	Kab. Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.830.000,0
141	Kab. Bario Selatan	-	-	14.850.000,0	-	-	1.980.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
142	Kab. Bario Utara	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
143	Kab. Kapuas	-	8.910.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
144	Kota Palangkaraya	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
145	Kab. Bario Timur	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
146	Kab. Gunung Mas	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
147	Kab. Lamau	-	5.940.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
148	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.710.000,0
149	Kab. Bario Kuala	-	-	28.710.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
150	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-	19.800.000,0	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
151	Kota Banjarbaru	-	-	14.950.000,0	-	-	-	9.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,0	-	-	9.800.000,0
152	Kab. Malinau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.850.000,0
153	Provinsi Sulawesi Utara	-	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
154	Kab. Bolaang Mongondow	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
155	Kab. Minahasa	-	-	21.780.000,0	990.000,0	990.000,0	990.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.900.000,0
156	Kab. Sangihe	-	-	29.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.760.000,0
157	Kota Bunung	-	3.960.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
158	Kota Manado	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.910.000,0
159	Kab. Kepulauan Talaud	-	-	8.910.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.225.000,0
160	Kab. Minahasa Selatan	-	-	27.225.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
161	Kota Tomohon	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.485.000,0
162	Kab. Minahasa Utara	-	-	19.000.000,0	-	-	-	1.485.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.900.000,0
163	Kota Kotamobagu	-	-	24.000.000,0	-	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.900.000,0

(dalam ribu rupiah)

NO	PROVINSI /KABUPATEN/KOTA	PENDIDIKAN	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMDA	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA PEDESAAN UNTUK DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	LISTRIK PERDESAAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	JUMLAH
164	kab Belalang Mongondow Utara	-	6.930.000,0	25.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.930.000,0
165	kab Kep. Siau Tagulandang Baro	-	3.960.000,0	32.000.000,0	-	1.980.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.940.000,0
166	kab. Minahasa Tenggara	-	-	31.000.000,0	-	5.940.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.940.000,0
167	kab Belalang Mongondow Timur	-	3.960.000,0	27.720.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.680.000,0
168	kab Belalang Mongondow Selatan	-	3.960.000,0	27.720.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.680.000,0
169	Provinsi Gorontalo	-	-	4.950.000,0	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,0
170	kab Gorontalo	-	4.950.000,0	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
171	kotab Gorontalo	-	-	28.750.000,0	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.650.000,0
172	kab Panuwato	-	4.950.000,0	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
173	kab Bone Bolango	-	4.950.000,0	9.880.000,0	1.950.000,0	9.880.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.650.000,0
174	kab Gorontalo Utara	-	9.900.000,0	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
175	kab Banggai	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	19.800.000,0
176	kab Banggai Kepulauan	-	9.900.000,0	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
177	kab Tolitoli	-	9.900.000,0	4.950.000,0	4.950.000,0	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
178	kab Donggala	-	8.910.000,0	20.790.000,0	6.530.000,0	2.970.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
179	kab Morowali	-	15.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,0
180	kab Pesisir	-	-	37.125.000,0	-	-	-	2.475.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
181	kotab Palu	-	6.435.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.435.000,0
182	kab Sigi	-	-	22.770.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.770.000,0
183	Provinsi Sulawesi Selatan	-	9.900.000,0	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
184	kab Bantaeng	-	14.850.000,0	18.810.000,0	-	-	-	5.940.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
185	kab Barru	-	2.970.000,0	24.750.000,0	2.970.000,0	3.960.000,0	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
186	kab Bone	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
187	kab Bulukumba	-	-	24.750.000,0	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
188	kab Enrekang	-	-	14.850.000,0	-	-	-	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
189	kab Gowa	-	-	5.470.000,0	-	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,0	-	-	10.820.000,0
190	kab Jeneponto	-	-	24.750.000,0	9.900.000,0	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
191	kab Luwu	-	15.345.000,0	14.355.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
192	kab Luwu Utara	-	9.900.000,0	-	-	-	-	1.785.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.685.000,0
193	kab Maros	-	-	29.700.000,0	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
194	kab Pangkajene Kepulauan	-	-	29.700.000,0	4.950.000,0	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
195	kab Pinrang	-	1.980.000,0	27.720.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
196	kab Kepulauan Selayar	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0

(dalam ribu rupiah)

NO	PROVINSI / KABUPATEN/KOTA	PENDIDIKAN	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMDA	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA PEDESAAN UNTUK DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	LISTRIK PERDESAAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	JUMLAH
197	Kab. Siderang Rappang	-	-	14.850.000,0	-	-	-	14.602.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.452.500,0
198	Kab. Snpai	-	-	24.750.000,0	-	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
199	Kab. Soppeng	-	-	-	18.810.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.810.000,0
200	Kab. Takalar	-	-	38.650.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.650.000,0
201	Kab. Tana Toraja	-	4.950.000,0	34.650.000,0	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
202	Kab. Wajo	-	4.950.000,0	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
203	Kota Parepare	7.920.000,0	-	-	-	-	-	3.168.000,0	-	-	-	-	-	-	297.000,0	-	-	-	11.385.000,0
204	Kota Palopo	-	4.950.000,0	34.650.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
205	Kab. Luwu Timur	-	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
206	Kab. Toraja Utara	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,0
207	Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	69.300.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.300.000,0
208	Kab. Majene	-	-	-	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.850.000,0
209	Kab. Mamuju	-	9.925.000,0	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.625.000,0
210	Kab. Polewali Mandar	-	-	24.750.000,0	-	4.950.000,0	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
211	Kab. Mamuju Utara	-	19.800.000,0	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
212	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
213	Kab. Buana	-	-	39.600.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
214	Kab. Konawe	-	-	1.980.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980.000,0
215	Kab. Muna	-	14.850.000,0	17.820.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.670.000,0
216	Kota Kendari	-	-	14.850.000,0	-	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
217	Kota Bau-Bau	-	-	24.705.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.705.000,0
218	Kab. Konawe Selatan	-	9.900.000,0	19.800.000,0	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
219	Kab. Bombana	-	10.890.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.890.000,0
220	Kab. Wakatobi	-	4.950.000,0	34.650.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
221	Kab. Kolaka Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	14.850.000,0
222	Kab. Konawe Utara	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,0
223	Kab. Buton Utara	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
224	Kab. Banggai	-	-	34.650.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.650.000,0
225	Kab. Buleleng	-	-	29.705.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.705.000,0
226	Kab. Ganyar	-	8.167.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.017.500,0
227	Kab. Karangasem	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
228	Kab. Tabanan	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,0
229	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	69.300.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.300.000,0

(dalam ribuan rupiah)

NO	PROVINSI /KABUPATEN/KOTA	PENDIDIKAN	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMDA	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA PEDESAAN UNTUK DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	LISTRIK PERDESAAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	JUMLAH
230	Kab. Bima	-	-	29.700.000,0	-	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
231	Kab. Dompu	-	-	39.700.000,0	-	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.700.000,0
232	Kab. Lombok Barat	-	-	29.205.000,0	-	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.105.000,0
233	Kab. Lombok Timur	-	-	24.750.000,0	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
234	Kab. Sumbawa	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
235	Kota Mataram	-	-	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
236	Kota Bima	-	-	29.700.000,0	-	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.650.000,0
237	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
238	Kab. Alor	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,0
239	Kab. Belu	-	-	35.145.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.145.000,0
240	Kab. Ende	-	8.910.000,0	8.910.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.820.000,0
241	Kab. Flores Timur	-	-	16.830.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.830.000,0
242	Kab. Kupang	-	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,0
243	Kab. Lembata	-	-	17.325.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.325.000,0
244	Kab. Manggarai	-	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,0
245	Kab. Ngada	-	-	28.662.500,0	-	-	-	11.200.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.862.500,0
246	Kab. Sikka	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
247	Kab. Sumba Barat	-	-	37.956.600,0	1.643.400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
248	Kab. Sumba Timur	-	-	24.750.000,0	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
249	Kota Kupang	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,0
250	Kab. Rote Ndao	-	-	2.475.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.475.000,0
251	Kab. Manggarai Barat	-	-	25.492.500,0	1.663.000,0	2.524.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
252	Kab. Sumba Barat Daya	-	-	34.650.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.650.000,0
253	Kab. Sumba Tengah	-	-	29.700.000,0	6.930.000,0	2.970.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
254	Kab. Manggarai Timur	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
255	Kab. Sabu Raijua	-	-	-	2.475.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.475.000,0
256	Provinsi Maluku	-	-	39.600.000,0	-	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.350.000,0
257	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-	39.600.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
258	Kab. Maluku Tenggara	-	-	17.077.500,0	-	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.977.500,0
259	Kab. Buru	-	-	39.600.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
260	Kota Ambon	-	-	19.800.000,0	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
261	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
262	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0

(dalam ribu rupiah)

NO	PROVINSI /KABUPATEN/KOTA	PENDIDIKAN	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMDA	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA PEDESAAN UNTUK DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	LISTRIK PERDESAAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	JUMLAH
263	Kab. Kepulauan Aru	-	4.455.000,0	24.255.000,0	-	4.950.000,0	-	4.455.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.115.000,0
264	Kota Tali	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,0
265	Kab. Maluku Barat Daya	-	-	4.500.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,0
266	Provinsi Maluku Utara	-	37.125.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.125.000,0
267	Kab. Halmahera Tengah	-	-	29.700.000,0	4.950.000,0	-	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
268	Kab. Halmahera Barat	-	-	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,0
269	Kota Ternate	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
270	Kab. Halmahera Timur	-	-	39.200.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.200.000,0
271	Kab. Kepulauan Sula	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
272	Kab. Halmahera Selatan	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
273	Kab. Jayapura	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
274	Kab. Jayawijaya	-	-	39.600.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
275	Kab. Mimika	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
276	Kab. Nabire	-	4.950.000,0	34.650.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
277	Kab. Paniai	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
278	Kab. Puncak Jaya	-	9.900.000,0	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
279	Kab. Kepulauan Yapen	-	-	29.601.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.601.000,0
280	Kab. Sarmi	-	-	14.850.000,0	-	-	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.105.000,0
281	Kab. Keerom	-	22.770.000,0	16.335.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
282	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	21.482.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.482.000,0
283	Kab. Tolikara	-	18.315.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.315.000,0
284	Kab. Soven Digoel	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
285	Kab. Mapii	-	7.920.000,0	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.670.000,0
286	Kab. Arnat	-	16.506.443,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.506.443,3
287	Kab. Wamren	-	-	39.501.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.501.000,0
288	Kab. Surobi	-	-	19.305.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.305.000,0
289	Kab. Mamberamo Raya	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,0
290	Kab. Yalimo	-	4.455.000,0	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.355.000,0
291	Kab. Lanny Jaya	-	-	29.650.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.650.500,0
292	Kab. Nduga	-	-	39.501.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.501.000,0
293	Kab. Puncak	-	5.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,0
294	Kab. Intan Jaya	-	-	34.650.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.650.000,0
295	Provinsi Papua Barat	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0

(dalam ribu rupiah)

NO	PROVINSI /KABUPATEN/KOTA	PENDIDIKAN	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMDA	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA PEDESAAN UNTUK DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	LISTRIK PERDESAAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	JUMLAH
296	Kab. TeLUK BIRUNI	-	4.950.000,0	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.650.000,0
297	Kab. TeLUK WONDAMA	-	13.365.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.365.000,0
298	Kab. Tambora	-	-	39.501.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.501.000,0
Jumlah Total		40.250.000,0	390.087.700,0	5.320.649.900,0	556.774.400,0	209.734.500,0	51.460.000,0	386.048.500,0	353.838.000,0	34.155.000,0	6.435.000,0	1.980.000,0	14.850.000,0	8.910.000,0	7.425.000,0	23.467.000,0	5.445.000,0	6.930.000,0	7.700.800.000,0

(dalam ribu rupiah)

MENTERI PERTANIAN

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 25 /PMK.07/2011 TENTANG
 PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA
 PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

**KOP
 KEPALA
 DAERAH**

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota*) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*)..... telah mencantumkan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 atau akan mencantumkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011*) dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima Surat Pernyataan ini ditetapkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap I Dana Penyesuaian Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2011.

Tempat, tanggal.....
 Gubernur/Bupati/Walikota*).....

Nama.....

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 25 /PMK.07/2011 TENTANG
 PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM
 DAN ALOKASI DANA PENYESUAIAN
 INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN
 2011

KOP KEPALA
 DAERAH

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota¹⁾..... Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 Tahap..... sebagai berikut:

Bidang	Pagu
1.
2. dsd.....
Total Pagu ²⁾

Tanggal ³⁾	Tahap	Sisa Tahap sebelumnya	Penerimaan dari Kas Umum Negara	Total	Realisasi pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah) ⁴⁾	Sisa DPID di Rekening Kas Umum Daerah	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5-6	8=(7/5) x 100
	Tahap I						
	Tahap II						
	Tahap III						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksa aparat pengawas fungsional

Denyikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
 Gubernur/Bupati/Walikota ¹⁾

Nama

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi sesuai dengan alokasi dalam PMK Nomor.....Tentang
- 3) Diisi tanggal penerimaan transfer di Rekening Kas Umum Daerah
- 4) Minimal 90,0% dari dana yang ada di Rekening Kas Umum Daerah

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO